

**PERANAN PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KONFLIK
HORIZONTAL ANTAR ORMAS KEPEMUDAAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

Andre Syahbani Harahap *
Dr. Ibnu Affan., SH., M.H**
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., MH**

ABSTRAK

Pemolisian masyarakat menekankan peran aktif masyarakat dalam membangun keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penanganan konflik. Pemolisian masyarakat, adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban. Polmas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap peraturan, serta membangun sinergi antara Polri dan masyarakat.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan, bagaimana pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan, bagaimana hambatan dan upaya penerapan pemolisian masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal antar ormas kepemudaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan didukung data yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penegakan hukum terhadap konflik organisasi masyarakat (ormas) melibatkan berbagai aspek, termasuk aturan hukum yang mengatur ormas, peran aparat penegak hukum, dan potensi masalah dalam penegakan hukum terkait ormas. Ormas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi penegakan hukum. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) terutamanya mengatur strategi dan implementasi Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perkap ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Kata Kunci: Pemolisian Masyarakat, Konflik Horizontal, Ormas.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**THE ROLE OF COMMUNITY POLICING IN HANDLING VIOLENT
CRIMES RESULTING IN HORIZONTAL CONFLICT
BETWEEN YOUTH ORGANIZATIONS
(Study at the Medan City Police Department)**

Andre Syahbani Harahap *
Dr. Ibnu Affan., SH., M.H**
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., MH**

ABSTRACT

Community policing emphasizes the active role of the community in building security and order, including in handling conflicts. Community policing is an approach to law enforcement that emphasizes partnerships between the police and the community to prevent and resolve security and order problems. Community policing aims to increase community participation, legal awareness, and compliance with regulations, as well as build synergy between the Police and the community.

The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of community policing in dealing with horizontal conflicts between youth mass organizations, how the implementation of community policing in dealing with horizontal conflicts between youth mass organizations that result in violent crimes, what are the obstacles and efforts to implement community policing in dealing with horizontal conflicts between youth mass organizations that result in violent crimes

The research method used is descriptive analysis that leads to normative legal research and is supported by empirical legal data, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Law enforcement against community organization (ormas) conflicts involves various aspects, including legal regulations governing mass organizations, the role of law enforcement officers, and potential problems in law enforcement related to mass organizations. Mass organizations do not have the authority to carry out law enforcement functions. The Chief of Police Regulation (Perkap) on Community Policing (Polmas) primarily regulates the strategy and implementation of Polmas in order to maintain public security and order, as well as provide protection, patronage, and services to the community. This Perkap also aims to build partnerships and cooperation with the community in maintaining security and order in their environment.

Keywords: Community Policing, Horizontal Conflict, Mass Organizations

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*